

## ABSTRAKSI

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan sebagian besar wilayahnya adalah perairan / laut terkandung potensi sumber daya yang besar. Kurangnya peran pemerintah dalam mengelola sumber daya laut tersebut mengakibatkan permasalahan-permasalahan dalam pemanfaatannya. Seperti rendahnya tingkat kehidupan nelayan tradisional, banyaknya kasus pelanggaran (*Illegal, Unreported, Unregulated*) *fishing*. Oleh karena itu untuk mencegah dan mengantisipasi permasalahan tersebut maka perlu adanya peran dari pemerintah dalam mengawasi pemanfaatan sumber daya laut agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif, efisien dan sesuai dengan prosedur. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Henry Fayol yaitu Pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan.

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan teknik penentuan informan secara purposive. Lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan dan desa Tasik Madu kabupaten Trenggalek. Dari hasil analisa diperoleh kesimpulan bahwa peran dari Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya laut meliputi 3 kegiatan : pengawasan langsung secara terpadu bekerja sama dengan instansi terkait dan POKMASWAS. Kedua adalah pembinaan dan penegakan hukum. Yang ketiga adalah memberdayakan kelompok masyarakat.

Kata kunci : Pengawasan, sumber daya laut.